

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika suatu pemerintah mampu menerapkan praktik *good governance*, maka masyarakat akan semakin percaya pada lembaga publik dan akan lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Yafizham & Daulay, 2023). Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sangat penting bagi sebagian besar masyarakat untuk membangun sistem politik yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi universal dan melayani kepentingan masyarakat dengan lebih baik. Salah satu prinsip mendasar tata kelola yang efektif dalam operasional pemerintahan adalah pengelolaan anggaran yang bijaksana, serta komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi.

Anggaran merupakan persyaratan penting yang merupakan bagian integral dari kegiatan perencanaan yang paling efektif, memastikan bahwa semua tugas yang direncanakan dilaksanakan selaras dengan anggaran dan dilaporkan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban organisasi (Iswara et al., 2023). Anggaran menawarkan kepada manajemen gambaran komprehensif tentang sumber daya yang diperlukan bisnis untuk melaksanakan operasi yang direncanakan. Kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya adalah penganggaran yang terencana dan dilaksanakan. Organisasi dapat mengelola keseluruhan program untuk memastikan program tersebut mengikuti kriteria yang ditetapkan dan juga memastikan tujuan tercapai (Anwar et al., 2022).

Anggaran pada instansi pemerintah mempunyai peranan penting dalam memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab dan kegiatan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan efisien demi kemajuan masyarakat. Selain berfungsi sebagai alat akuntabilitas publik, anggaran pada instansi pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan hasil belanja dana publik. Berkat hal ini, kita sekarang dapat mengukur efisiensi badan-badan publik. Jadi, gagasan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah selaras dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang terukur di sepanjang siklus anggaran. Seluruh bagian proses anggaran yang terbuka untuk pengawasan publik, termasuk persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan penilaian (Romanda & Dwiyant, 2021).

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang saling berhubungan, berkelanjutan, dan dilaksanakan secara efisien merupakan empat pilar siklus pembangunan daerah (Eskandar, 2022). Pemerintah daerah mempunyai peran dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong pembangunan di daerahnya masing-masing. Perencanaan yang efektif sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan yang efektif dapat menjamin belanja daerah dialokasikan untuk program dan kegiatan yang paling penting dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat (Priskila & Hukom, 2023).

Pencapaian tujuan yang efektif dan efisien memerlukan perencanaan yang cermat, yang memerlukan perumusan strategi dan penetapan rutinitas. Pada awal setiap usaha perusahaan muncullah fase perencanaan strategis. Perencanaan yang efektif memfasilitasi kelancaran kemajuan melalui berbagai fase kegiatan yang sedang berlangsung. Meskipun demikian, perencanaan yang efektif memerlukan dukungan usaha yang tekun dan ketekunan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Prasetio Ariwibowo et al., 2022).

Perencanaan diwujudkan melalui penciptaan anggaran, dan hasilnya diukur melalui aktualisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi yang berkaitan dengan anggaran keuangan. Perencanaan yang efektif mempunyai dampak yang besar terhadap aktualisasi suatu anggaran. Perencanaan anggaran yang efektif sangat penting untuk keberhasilan implementasi anggaran dan mencapai target secara efisien. Sebaliknya, kesalahan dalam perencanaan anggaran menyebabkan terhambatnya pelaksanaan anggaran sehingga

mengakibatkan lambannya pemanfaatan dana dan prosedur akuntabilitas (Ratag et al., 2019).

Selain dampaknya yang besar terhadap implementasi, perencanaan juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengendalian. Sementara perencanaan adalah memikirkan secara serius dan memutuskan tindakan di masa depan dengan tujuan mencapai tujuan yang ditetapkan, pengendalian adalah proses memeriksa bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan, terstruktur, dan dilaksanakan menghasilkan hasil yang diinginkan (Bako & Panjaitan, 2022).

Pengendalian bergantung pada adanya tujuan dan strategi. Perencanaan melibatkan pembuatan serangkaian tindakan yang perlu diselesaikan sebelum melaksanakan tugas sebenarnya, dengan tujuan memastikan kelancaran pelaksanaan. Sistem pengendalian menjadi lebih efektif ketika hubungan antara perencanaan dan pengendalian menjadi lebih eksplisit dan akurat (Sugiyanto, 2016).

Manajemen organisasi yang efektif memerlukan penerapan perencanaan dan pengendalian. Sasaran, sasaran, sasaran kinerja, strategi, rencana kerja, dan kegiatan semuanya merupakan bagian dari proses perencanaan. Hal sebaliknya terjadi pada pengendalian, yang digunakan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana dan tujuan, sasaran, serta target kinerja telah tercapai. Anggaran, yang secara formal merupakan dokumen yang menguraikan tujuan dan strategi lembaga pemerintah, sering kali digunakan untuk melaksanakan perencanaan dan pengendalian. Setiap departemen dapat menggunakan ini sebagai cetak biru tentang bagaimana melakukan tugasnya.

Untuk menilai peran organisasi dan manajer dalam memberikan layanan publik yang lebih baik, diperlukan metode perencanaan dan pengendalian yang efektif. Membuktikan bahwa dana publik digunakan secara efektif, efisien, dan terjangkau hanyalah salah satu aspek akuntabilitas. Dua tujuan utama dicapai melalui penerapan metode perencanaan dan pengendalian publik. Tujuan dari metrik sektor publik

adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintah. Selain itu, pengalokasian dana merupakan tujuan lain dalam menilai kinerja sektor publik (Adyaqsha, 2022).

Anggaran merupakan instrumen perencanaan keuangan yang biasa digunakan oleh lembaga. Anggaran adalah metode perencanaan yang melibatkan penggunaan data numerik oleh suatu organisasi. Anggaran berfungsi sebagai alat strategis untuk menentukan maksud dan tujuan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh suatu instansi. Pengeluaran yang terkait dengan rencana tersebut dirinci, dan sumber pendapatan lembaga tersebut dicantumkan. Sistem ini memberikan rencana menyeluruh atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagai alat pengelolaan fiskal, menjamin tanggung jawab dan keterbukaan kepada publik. Tujuannya adalah untuk menghindari pemborosan uang untuk proyek-proyek yang tidak penting atau memberikan terlalu sedikit perhatian pada sektor-sektor tertentu (Maghfirah & Nasution, 2022).

Anggaran adalah rencana formal yang menguraikan aktivitas keuangan suatu perusahaan atau organisasi untuk periode tertentu. Hal ini biasanya disajikan dalam bentuk moneter dan nyata. Anggaran adalah alat ekonomi penting yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran merupakan komponen perencanaan keuangan masa depan yang mencakup beragam perkiraan manajerial, seperti proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan transaksi moneter lainnya untuk tahun mendatang (Saputri et al., 2023).

Anggaran adalah dokumen paling penting dalam pemerintahan karena merinci semua perkiraan pengeluaran dan kegiatan untuk tahun depan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah menangani pendanaan dan administrasi kegiatan pemerintahan, serta proyek pembangunan di daerahnya. Dimungkinkan untuk memprediksi hasil di masa depan dengan menggunakan uang yang dialokasikan. Dengan mengelola seluruh spektrum aktivitas dalam organisasi perusahaan secara efektif, tidak hanya tujuan tertentu yang

dapat dicapai, namun keseluruhan operasi dapat diatur agar selaras dengan tujuan perusahaan (Anwar et al., 2022).

Kewenangan dan tanggung jawab keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2007 sebagai keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat hak dan tanggung jawab daerah, dan seluruh kekayaan moneter menjadi bagiannya. Laporan realisasi anggaran adalah bagian penting dari setiap badan usaha atau pemerintah karena menunjukkan kinerja keuangan perusahaan (Ibrahim et al., 2020).

Efisiensi suatu lembaga dinilai berdasarkan perbedaan antara anggarannya dan pengeluaran aktual dalam satu tahun fiskal (N. S. Amanda & Harahap, 2022). Salah satu pendekatan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah daerah adalah dengan meninjau laporan realisasi anggaran. Sepanjang periode pelaporan, laporan realisasi anggaran membandingkan pengeluaran aktual terhadap anggaran. Format perbandingan laporan realisasi anggaran bermanfaat untuk memproyeksikan sumber kas masa depan untuk kegiatan pemerintah daerah.

Laporan realisasi anggaran memerinci perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan, termasuk apakah hal tersebut dilakukan secara murah, efisien, dan efektif sesuai dengan anggaran (APBN/APBD) dan batasan peraturan perundang-undangan (Laila et al., 2019).

Besar kecilnya anggaran yang dikeluarkan tergantung pada persiapan yang matang, karena tidak semua usulan anggaran dijamin disetujui. Jika perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tidak disusun dengan baik maka penyerapan anggaran juga akan lebih lama. Permasalahan pelaksanaan anggaran bermula dari perencanaan anggaran yang tidak akurat, yang pada akhirnya menyebabkan tertundanya prosedur penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran (Ratag et al., 2019). Tertundanya penyerapan anggaran karena kendala sumber daya manusia, perencanaan yang tidak efektif sehingga realisasinya di bawah standar, dan

penyerapan anggaran yang tidak konsisten akibat perubahan peraturan menjadi penyebab buruknya penyerapan anggaran.

Yang dimaksud dengan “persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95%” tercantum pada ayat (2) pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 yang mengatur tentang tata cara pencairan uang dan dampaknya terhadap kementerian negara dan lembaga. institusi karena gagal melaksanakan anggaran mereka. Jika proporsi penyerapan anggaran belanja kurang dari 95%, hal tersebut kurang tepat.

Berikut tabel hasil laporan anggaran belanja Kantor Kecamatan Stabat.

Tabel 1.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kantor Camat Stabat Tahun 2021-2023

No	Tahun Anggaran	Perencanaan(RP)	Realisasi (RP)	Persen(%)
1	2021	8.846.248.415	8.230.341.135	93,04%
2	2022	9.473.516.769	8.762.935.489	92,50%
3	2023	8.495.109.065	8.057.979.276	94,85%

Sumber: Data diolah oleh Kantor Kecamatan Stabat

Berdasarkan data, penyerapan anggaran di Kantor Kecamatan Stabat menunjukkan fluktuasi antara tahun 2021 hingga 2023. Penyerapan anggaran yang kurang dari 95% dinilai kurang optimal menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015.

Rifka (2019) menegaskan bahwa organisasi publik menggunakan aturan untuk menerapkan kebijakan organisasi dalam mengatasi kekhawatiran dan kesulitan saat ini. Namun perubahan aturan yang cepat dan sering, ditambah dengan keterbatasan waktu, memberikan tantangan bagi pelaksanaan operasional anggaran, sehingga mengakibatkan tertundanya penyerapan anggaran pada instansi pemerintah. Peraturan berdampak positif pada tingkat penggunaan anggaran.

Berdasarkan penelitian Weni pada tahun 2023, sumber daya manusia diyakini menjadi salah satu faktor penyebab lesunya penggunaan

dana. Dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah dan kepatuhan terhadap anggaran, departemen SDM berperan penting dalam mewujudkan rencana pemerintah. Untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, efisien, dan sukses, maka kualitas sumber daya manusia yang mencakup pengetahuan, motivasi, kemampuan, dan sikap sangatlah penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Stabat, penyerapan anggaran di Kantor Bupati Stabat belum optimal disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pimpinan dan anggota, belum memadainya realisasi penyerapan anggaran, serta adanya perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan.

Mengingat hal-hal di atas, jelas bahwa perkiraan biaya yang tepat atas semua jenis biaya sosial dan ekonomi, serta dampak negatif apa pun terhadap operasi dan kegiatan organisasi pemerintah diperlukan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun untuk dilaksanakan pada tahun 2017 dengan cara yang efektif dan efisien. Di sini Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah mempunyai peranan penting sebagai lembaga yang membantu pemerintah dalam menangani urusan keuangan, antara lain dalam menentukan kebijakan, melaksanakan tugas, memantau, mengevaluasi, dan teknis pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelola keuangan departemen adalah Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD merupakan lembaga teknis yang bertanggung jawab menghasilkan pendapatan daerah dan mengalokasikan dana untuk keperluan daerah melalui keuangan daerah (Agustin & Tarigan, 2022).

Berdasarkan temuan beberapa penelitian terdahulu bahwa penyerapan anggaran tidak sesuai dengan hasil yang direncanakan, penulis penelitian ingin menelaah: “**Analisis Perencanaan, Pelaksanaan,**

Realisasi dan Pengendalian Anggaran Berdasarkan Anggaran Belanja Rutin pada Kantor Camat Stabat Kabupaten Langkat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks di atas, permasalahan berikut ini diidentifikasi dalam penelitian ini:

1. Penyerapan anggaran belum optimal karena serapan presentase anggaran masih dibawah 95%.
2. Kurangnya diskusi antara pimpinan, perencana anggaran dan pelaksana anggaran.
3. Perubahan regulasi dan kebijakan Pemerintah menyebabkan serapan anggaran kurang maksimal.
4. Anggaran rendah di awal tahun dan meningkat pada akhir tahun

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya fokus pada analisis Perencanaan, Pelaksanaan, Realisasi, dan Pengendalian Anggaran Belanja Kantor Kecamatan Stabat dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan anggaran berdasarkan anggaran belanja rutin Kantor Camat Stabat?
2. Bagaimana pelaksanaan anggaran berdasarkan anggaran belanja rutin Kantor Camat Stabat?
3. Bagaimana realisasi anggaran berdasarkan anggaran belanja rutin Kantor Camat Stabat?
4. Bagaimana pengendalian anggaran berdasarkan anggaran belanja rutin Kantor Camat Stabat?

E. Tujuan Penelitian

Berikut garis besar tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan anggaran belanja rutin Kantor Camat Stabat.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan anggaran belanja rutin Kantor Camat Stabat
3. Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja rutin Kantor Camat Stabat
4. Untuk mengetahui pengendalian anggaran belanja rutin Kantor Camat Stabat

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penulis bertujuan untuk menggunakan penelitian ini sebagai alat untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman mereka tentang desain, pelaksanaan, dan pengelolaan anggaran daerah. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat penulis untuk meraih gelar sarjana strata satu di UIN Sumatera Utara.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Potensi keuntungan dari penelitian ini bagi peneliti selanjutnya adalah potensinya untuk meningkatkan pemahaman bacaan, memperdalam pemahaman, dan memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan subjek yang diselidiki penulis.

2. Manfaat Praktis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) direncanakan, dilaksanakan, dan dipantau dengan menggunakan data yang akan dikumpulkan dari penelitian ini. Hal ini akan memastikan bahwa dana didistribusikan dengan cara yang mendukung program yang telah diputuskan.